



# Pengarsipan Aset DKI Bermasalah

**L**EMAHNYA pengamanan arsip-arsip kepemilikan aset Provinsi DKI Jakarta ditengarai menjadi penyebab berlarutnya sengketa lahan pembangunan Stadion Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) hingga saat ini.

Pengamat tata kota Nirwono Joga saat ditemui di Balai Kota DKI, kemarin, mengatakan lahan taman BMW milik pemprov didapat dari hibah para pengembang sebagai kewajiban dari kepemilikan surat izin penunjuk penggunaan tanah (SIPPT).

Namun, akibat lemahnya pengawasan, lahan yang masih 'tidur' itu malah dibangun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Para pihak tersebut membuat sertifikat lahan sehingga lahan milik Pemprov DKI itu berpindah tangan.

"Lahan itu punya pemprov, tapi karena tidak dibangun dan tidak rapi pengamanan surat-suratnya, sertifikatnya hilang. Malah dibangun sama pihak lain dan keluar sertifikat kepemilikan lahan yang baru. Jadi ada ketidakhati-hatian dalam mengamankan aset sejak lama," kata Nirwono.

Nirwono pun berpandangan sengketa lahan itu tidak akan selesai dalam waktu dekat terlebih lagi pengembang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kalah di pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN). Nirwono pun menyebutkan sebaiknya pemprov mencari lahan lain untuk pembangunan stadion.

"Sebaiknya cari lahan baru. Pemprov masih punya lahan yang luas di daerah Cijantung," ujar Nirwono.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenarkan sejak lama pengamanan arsip-arsip kepemilikan aset pemprov bermasalah. Menurutnya,

banyak sertifikat lahan serta aset lainnya hilang. Pihaknya pun saat ini tengah berjuang untuk mengamankan kembali aset-aset milik pemprov. Namun, upaya tersebut dinilai cukup sulit sebab hal itu sudah terjadi sejak lama. "Itu sudah dari dulu, bukan sekarang saja. Memang arsip-arsip di DKI ini kacau. Makanya kita sedang bereskan. Ini PR dari 30-40 tahun lalu," kata Ahok.

## Anggaran terlalu besar

Mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto mengatakan anggaran pembangunan Stadion BMW pada tahun lalu sebesar Rp1,2 triliun terlalu besar. Padahal pemprov mengetahui adanya sengketa lahan yang belum selesai.

Dia menyatakan PT Agung Podomoro mengoordinasi enam pengembang properti Ibu Kota untuk menyerahkan fasos dan fasum kepada Pemprov DKI pada 2007 berbentuk tanah seluas 26,5 hektare atau senilai Rp737 miliar. Namun, hingga kini baik pemprov maupun pengembang belum bisa menunjukkan sertifikat lahan yang sah.

"Kalau ternyata terbukti sertifikat itu asli dan sah, ya langsung dibikin IMB. Jika tidak, ya panggil pengembangnya yang kasih tanah," kata Prijanto.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Heru Budihartono mengatakan akan membangun posko bersama dengan pihak aparat keamanan di dalam lokasi taman. (Put/Ssr/J-1)